

# LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 memuat Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan dimasa mendatang.

Kuala Tungkal, 6 Maret 2023

KEPALA BAPENDA



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi.....	4
1.5. Sistematika Penyajian.....	10
<b>Bab II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	11
2.2. Perjanjian Kinerja.....	13
<b>Bab III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Bapenda.....	14
B. Realisasi Anggaran .....	52
<b>Bab IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah di tetapkan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 memuat Hasil Pengukuran Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan salah satu unsur pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Isu – isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan Kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola objek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah

2. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam melakukan pemungutan pajak daerah
3. Memenuhi fasilitas dan meningkatkan pelayanan pemungutan pajak daerah
4. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
5. Meningkatkan kualitas data base dalam pengelolaan potensi pajak daerah
6. Meningkatkan kerjasama pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4).
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah Selaku Penyelenggaraan Negara baik di tingkat Pusat maupun di daerah yang berisikan tentang Informasi Keberhasilan maupun Kegagalan melaksanakan Misi Kepala Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah**

#### **1. Kedudukan dan Tugas Pokok**

Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Memperhatikan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 800/8759/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Persetujuan Jabatan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Provinsi Jambi melakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

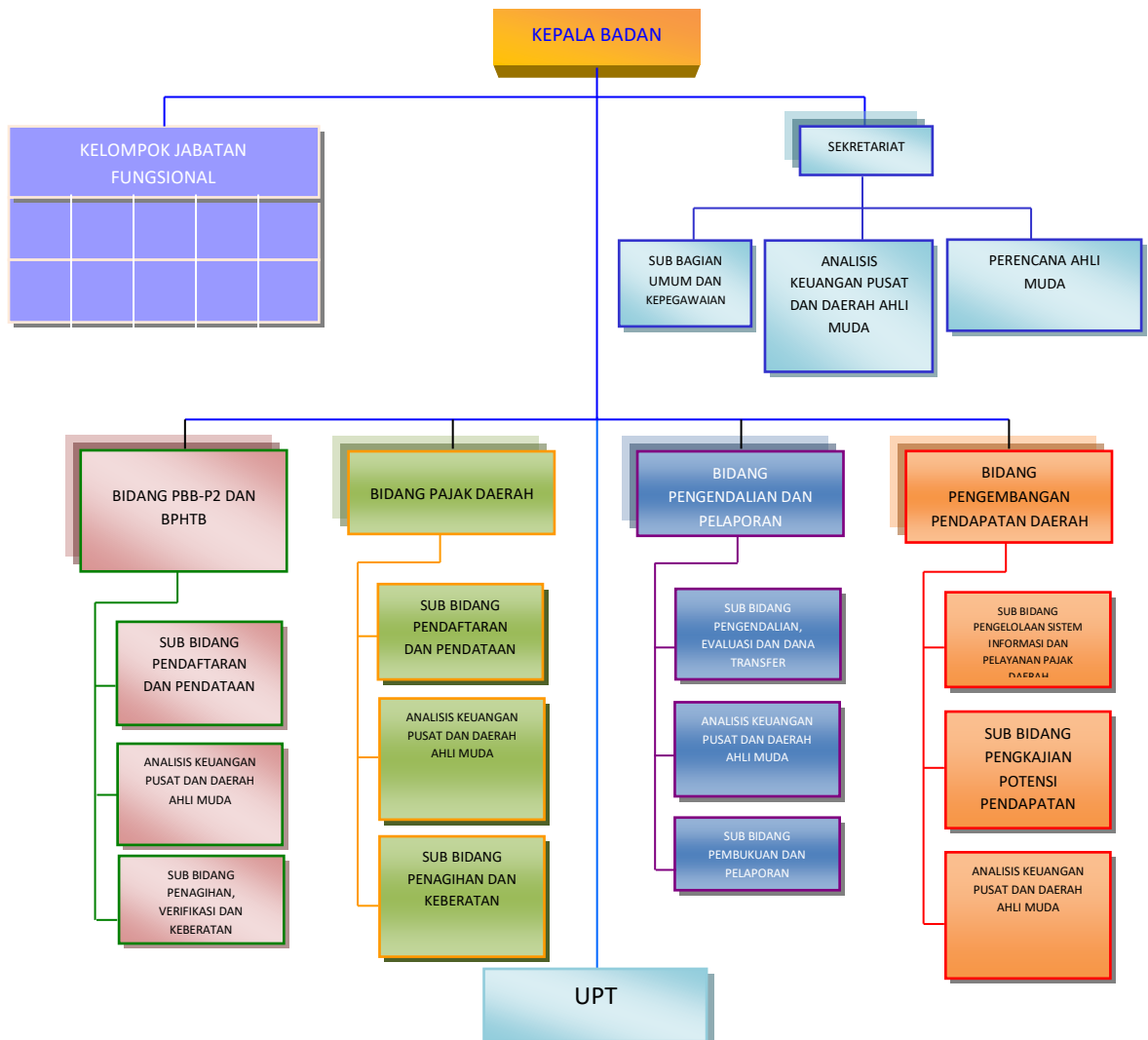
#### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;

- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah





Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
  1. Sub bagian Umum Kepegawaian
  2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  3. Perencana Ahli Muda
- b. Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas :
  1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
  2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  3. Sub bidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
  1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
  2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  3. Sub bidang Penagihan dan Keberatan
- d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas :
  1. Sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer
  2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  3. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
- e. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
  1. Sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah
  2. Sub bidang Pengkajian Potensi Pendapatan
  3. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

#### **4. Sumber Daya Aparatur**

Personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sejumlah 126 orang yang terdiri dari 47 orang PNS, dan 79 orang tenaga kerja kontrak (TKK) yang di distributorkan ke 5 bidang sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Bidang	PNS	CPNS	TKK/TKS	Jumlah
1.	Sekretariat	11 Orang	-	31 Orang	42 Orang
2.	Pajak Daerah	9 Orang	-	14 Orang	23 Orang
3.	PBB-P2 dan BPHTB	13 Orang	-	16 Orang	29 Orang
4.	Pengendalian dan Pelaporan	7 Orang	-	9 Orang	16 Orang
5.	Pengembangan Pendapatan Daerah	7 Orang	-	9 Orang	16 Orang
Jumlah		47 Orang	-	79 Orang	126 Orang

### Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sarana kerja yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah adalah :

URAIAN	BANYAKNYA
<b>KOMPUTER</b>	
- Mini Komputer	1
- Komputer Jaringan lainnya	7
- PC Unit	56
- Laptop	42
- Tablet PC	22
- Personal Komputer Lainnya	38
- Harddisk	1
- Peralatan MainFrame Lainnya	7
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	110
- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
- External	8
- Peralatan Personal Komputer lainnya	2
- Server	3
- Router	3
- Hub	3
- Peralatan Jaringan lainnya	1
<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>	
- Peralatan Olah Raga Lainnya (dst)	1
<b>ALAT ANGKUTAN</b>	
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah )	6
- Pick Up	1
- Sepeda Motor	31
<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	

- Global Positioning System	3
- Alat Pengukur Garis Tengah	2
- Alat ukur lain-lain lainnya	2
<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	
- Mesin Hitung Liskrik	1
- Mesin Kas Register	10
- Lemari Besi Metal	85
- Rak Besi	2
- Filing Cabinet Basi	3
- Brandkas	2
- Lemari Kaca	5
- CCTV (Camera Control Television System)	1
- Papan Visual/Papan Nama	23
- Alat Penghancur Kertes	6
- Mesin Absensi	1
- Papan Nama Instansi	1
- Papan Pengumuman	34
- Papan Tulis	1
- Teralis	1
- Alat Kantor Lainnya	1
- Meja Kerja Kayu	15
- Kursi Besi dan Metal	280
- Meja Rapat	3
- Meja Panjang	8
- Meja ½ Biro	16
- Kursi Fiber Glas/Plastik	1
- Kursi Tamu	13
Meja Komputer	35
Alat Pembersih lainnya	4
Lemari Es	1
AC Split	48
Kipas Angin	4
Televisi	7
Sound System	3
Unit Power Supply	40
Stabilisator	7
Camera film	2
Alat Hiasan	17
Tangga Aluminium	1
Mimbar/Podium	1

Hardy Cam	1
Karpet	10
Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	18
Kursi Kerja Pejabat lainnya	16
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	14
<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKAST DAN PEMANCAR</b>	
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
- Digital LED Running Text	3
- Layar Film/Projector	4
- Camera Digital	3
- Mesin Cetak Listrik Sheet	2
- Mesin Cetak Elektronik	1
- Facsimile	1
- Genset	1

## 5. Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 pada APBDP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam DPA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	Pendapatan (PAD)	Rp. 31.194.696.493
2	Belanja	Rp. 12.377.200.665
	- Belanja Operasional	Rp. 11.526.919.193
	- Belanja Modal	Rp.850.281.472

### 1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

**Bab I**   Pendahuluan

**Bab II**   Perencanaan Kinerja

**Bab III**   Akuntabilitas Kinerja

    A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

    B. Realisasi Anggaran

**Bab IV**   Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipergunakan sebagai arah dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS).**

Visi tersebut diimplementasikan kedalam 5 misi, yaitu:

- Misi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak.
- Misi 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
- Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- Misi 4 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- Misi 5 : Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai kekota

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Secara umum tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkontribusi langsung

dalam mendukung pencapaian Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dengan Indikator Utama “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah”.

**PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 s/d TAHUN 2026  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,247,761,849,420.00</b>	<b>1,150,000,000,000.00</b>	<b>1,199,800,001,000.00</b>	<b>1,243,840,001,500.00</b>	<b>1,299,812,800,000.00</b>	<b>1,364,803,440,500.00</b>
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>120,000,000,000.00</b>	<b>96,135,351,000.00</b>	<b>101,660,000,000.00</b>	<b>111,945,600,000.00</b>	<b>123,482,215,500.00</b>	<b>136,480,344,500.00</b>
1	Pajak Daerah	36,596,319,500.00	36,304,197,500.00	38,122,500,000.00	41,979,600,000.00	45,688,419,500.00	49,815,325,500.00
2	Retribusi Daerah	3,175,100,000.00	2,295,170,000.00	3,558,100,000.00	5,597,280,000.00	7,408,933,000.00	9,553,624,500.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,238,139,900.00	11,226,000,000.00	12,707,500,000.00	13,993,200,000.00	15,435,277,000.00	17,060,043,000.00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	66,990,440,600.00	46,309,983,500.00	47,271,900,000.00	50,375,520,000.00	54,949,586,000.00	60,051,351,500.00
<b>II</b>	<b>Dana Transfer</b>	<b>1,088,436,649,420.00</b>	<b>1,010,039,349,000.00</b>	<b>1,052,342,562,500.00</b>	<b>1,083,807,091,000.00</b>	<b>1,125,838,908,500.00</b>	<b>1,175,306,836,500.00</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	244,465,259,000.00	244,518,751,000.00	251,854,313,500.00	259,409,943,000.00	269,786,341,000.00	281,926,726,000.00
2	Dana Alokasi Umum	495,245,924,000.00	479,384,508,000.00	488,972,198,500.00	503,641,364,500.00	518,750,605,500.00	534,313,123,500.00
3	Dana Alokasi Khusus	166,169,575,000.00	117,228,229,000.00	117,957,501,000.00	117,392,291,500.00	123,562,447,000.00	134,341,003,500.00
4	DID (Dana Insentif Daerah)	25,251,347,000.00	7,575,404,000.00	25,251,347,000.00	27,776,482,000.00	30,554,129,500.00	33,609,542,500.00
5	Dana Desa dan Desa Adat	109,187,748,000.00	109,187,748,000.00	113,555,258,000.00	118,097,468,500.00	122,821,367,000.00	127,734,221,500.00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	46,616,796,420.00	52,144,709,000.00	54,751,944,500.00	57,489,541,500.00	60,364,018,500.00	63,382,219,500.00
7	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintahan Daerah Lainnya	1,500,000,000.00	0.00	0.00			

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah)					
		2021	2022 (Base Line)	2023	2024	2025	2026
III	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
1	Hibah	39,325,200,000.00	43,825,300,000.00	45,797,438,500.00	48,087,310,500.00	50,491,676,000.00	53,016,259,500.00
2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna melaksanakan Program/Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penerimaan pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatn Daerah	Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	8,06%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Akip	79,00% 69,00%



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 yang dijadikan target Tahunan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 :

#### Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,06%	11,35%	140,82%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,00	83,73	105,99%
		- Nilai AKIP	69,00	76,13	110,33%

Pengukuran kinerja terhadap target indikator pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut :

#### 1. SASARAN 1 :

**Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah** dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 dengan Target 8,06%.

Sebagai Dasar untuk mengukur Capaian Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yakni Realisasi dari Target Pendapatan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat pada APBDP Tahun 2022 yang telah

ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

**Rekapitulasi Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan PAD Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022**

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan Daerah			PAD yang dikelola BAPENDA		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>Pajak Daerah</b>	<b>31.194.696.493,00</b>	<b>33.014.821.695,00</b>	<b>105,83</b>	<b>31.194.696.493,00</b>	<b>33.014.821.695,00</b>	<b>105,83</b>
	- Pajak Hotel	180.000.000,00	304.600.667,00	169,22	180.000.000,00	304.600.667,00	169,22
	- Pajak Restoran	3.787.000.000,00	4.711.011.323,00	124,40	3.787.000.000,00	4.711.011.323,00	124,40
	- Pajak Hiburan	5.000.000,00	3.844.550,00	76,89	5.000.000,00	3.844.550,00	76,89
	- Pajak Reklame	500.000.000,00	422.908.324,00	84,58	500.000.000,00	422.908.324,00	84,58
	- Pajak Penerangan Jalan	13.870.000.000,00	17.010.434.126,00	122,64	13.870.000.000,00	17.010.434.126,00	122,64
	- Pajak Parkir	35.000.000,00	40.509.600,00	115,74	35.000.000,00	40.509.600,00	115,74
	- Pajak Air Bawah Tanah	81.900.000,00	21.270.828,00	25,97	81.900.000,00	21.270.828,00	25,97
	- Pajak Sarang Burung Walet	295.000.000,00	78.461.000,00	26,60	295.000.000,00	78.461.000,00	26,60
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.524.390.500,00	1.330.895.000,00	87,31	1.524.390.500,00	1.330.895.000,00	87,31
	- Pajak PBB P2	5.500.000.000,00	4.610.394.482,00	83,83	5.500.000.000,00	4.610.394.482,00	83,83
	- Pajak BPHTB	5.416.405.993,00	4.480.491.795,00	82,72	5.416.405.993,00	4.480.491.795,00	82,72
2.	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>2.581.266.250,00</b>	<b>2.422.698.393,17</b>	<b>93,86</b>	-	-	-
	- Retribusi Jasa Umum	1.626.266.250,00	1.502.403.818,00	92,38	-	-	-
	- Retribusi Jasa Usaha	755.000.000,00	828.095.200,00	109,68	-	-	-
	- Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	92.199.375,17	46,10	-	-	-
3.	<b>Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>11.226.000.000,00</b>	<b>11.703.638.397,40</b>	<b>104,25</b>	-	-	-
	- Bank Jambi (Deviden)	9.796.000.000,00	10.528.936.340,30	107,48	-	-	-
	- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.430.000.000,00	1.174.702.057,10	82,15	-	-	-
4.	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>79.642.348.500,00</b>	<b>83.338.855.808,81</b>	<b>104,64</b>	<b>26.350.000,00</b>	<b>58.672.782,00</b>	<b>222,67</b>
	- Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	582.000.000,00	958.302.540,00	164,66	-	-	-
	- Penerimaan Jasa Giro	500.000.000,00	5.928.591.441,71	1.185,72	-	-	-
	- Pendapatan Bunga Deposito	8.000.000.000,00	4.877.506.870,45	60,97	-	-	-
	- Tuntutan Kerugian Barang Daerah	-	39.933.000,00	-	-	-	-
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	172.646.598,59	-	-	-	-
	- Pendapatan Denda Pajak	26.350.000,00	58.672.782,00	222,67	26.350.000,00	58.672.782,00	222,67
	- Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Dari Pengembalian	7.001.000.000,00	2.695.481.700,13	38,50	-	-	-
	- Pendapatan BLUD	51.316.014.900,00	58.687.370.216,45	114,36	-	-	-
	- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	11.451.309.000,00	10.591.484.725,00	92,49	-	-	-
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	765.674.600,00	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan dari Penerimaan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>124.644.311.243,00</b>	<b>130.480.014.294,38</b>	<b>104,68</b>	<b>31.221.046.493,00</b>	<b>33.073.494.477,00</b>	<b>105,93</b>

Untuk Mengukur Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dapat Kita lihat pada Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi PAD Th 2022}}{\text{Target Pendapatan Daerah pada Renstra / RPJMD Th 2022}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 Rp.130.480.014.294,38 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2022 Sebesar RP. 1.150.000.000.000,00 Jadi, Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. } 130.480.014.294,38}{\text{Rp. } 1.150.000.000.000,00} \times 100\% = 11,35\%$$

Sedangkan mengukur capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \frac{11,35\%}{8,06\%} \times 100\% = 140,82\%$$

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 dari Target 8,06% terealisasi 11,35% dengan Capaian Kinerja 140,82%. Yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah terealisasi 105,83%, Retribusi Daerah terealisasi 93,86%, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan terealisasi 104,25% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi 104,64% dari masing-masing Target Penerimaan 100%.

## **2. SASARAN 2 :**

### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator :**

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 79,00

Hasil Survei pengukuran IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan 9 unsur penilaian antara lain:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk / Hasil Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Maklumat Pelayanan
9. Mekanisme Pengaduan Pelayanan

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2022 terealisasi 83,73 dari target 79,00 dengan capaian kinerja 105,99 %.

- Nilai AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemenuhan Dokumen Perencanaan, Implementasi Pelaporan dan Evaluasi SAKIP Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari target Nilai 69,00 terealisasi 76,13 dengan capaian 110,33%.

- **Capaian Kinerja PAD Yang Dikelola Bapenda Tahun 2022**

PAD yang dikelola Bapenda pada Tahun 2022 yakni Pajak Daerah yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan Denda Pajak Daerah) Penerimaan Pendapatan untuk Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 31.194.696.493,00 terealisasi sebesar Rp. 33.014.821.695,00,00 dengan capaian 105,83% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Hotel dari target sebesar Rp. 180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 304.600.667,00 dengan capaian 169,22 %
2. Pajak Restoran dari target sebesar Rp. 3.787.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.711.011.323,00 dengan capaian 124,40 %
3. Pajak Hiburan dari target sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.844.550,00 dengan capaian 76,89 %
4. Pajak Reklame dari target sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 422.908.324,00 dengan capaian 84,58 %
5. Pajak Penerangan Jalan dari target sebesar Rp. 13.870.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.010.434.126,00 dengan capaian 122,64 %
6. Pajak Parkir dari target sebesar Rp. 35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.509.600,00 dengan capaian 115,74 %
7. Pajak Air Bawah Tanah dari target sebesar Rp. 81.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.270.828,00 dengan capaian 25,97 %
8. Pajak Sarang Burung Walet dari target sebesar Rp. 295.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 78.461.000,00 dengan capaian 26,60 %
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target sebesar Rp. 1.524.390.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.330.895.000,00 dengan capaian 87,31 %
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari target sebesar Rp. 5.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.610.394.482,00 dengan capaian 83,83 %
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sebesar Rp. 5.416.405.993,00 terealisasi sebesar Rp. 4.480.491.795,00 dengan capaian 82,72%

Sedangkan untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Denda Pajak dari target Rp. 26.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 58.672.782,00 atau 222,67%.

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar 105,93%, ini disebabkan :

Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang Realisasinya Melampaui Target diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir, sedangkan Pajak Daerah yang belum tercapai Targetnya akan terus Kami upayakan dan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :

- a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
- b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
- e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

## Capaian Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja	TAHUN								
		2020			2021			2022		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>29.277.086.500,00</b>	<b>30.830.634.493,00</b>	<b>105,31</b>	<b>36.121.319.500,00</b>	<b>31.752.296.480,00</b>	<b>87,90</b>	<b>31.194.696.493,00</b>	<b>33.014.821.695,00</b>	<b>105,83</b>
	- Pajak Hotel	499.950.000,00	150.773.500,00	30,16	119.950.000,00	185.104.100,00	154,32	180.000.000,00	304.600.667,00	169,22
	- Pajak Restoran	2.565.856.000,00	3.001.732.553,00	116,99	3.620.000.000,00	4.131.923.262,00	114,14	3.787.000.000,00	4.711.011.323,00	124,40
	- Pajak Hiburan	11.840.000,00	2.850.000,00	24,07	11.840.000,00	3.594.500,00	30,36	5.000.000,00	3.844.550,00	76,89
	- Pajak Reklame	351.200.000,00	294.003.877,00	83,71	436.000.000,00	354.084.745,00	81,21	500.000.000,00	422.908.324,00	84,58
	- Pajak Penerangan Jalan	16.750.000.000,00	18.415.493.504,00	109,94	18.125.239.000,00	18.078.230.466,00	99,74	13.870.000.000,00	17.010.434.126,00	122,64
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	901.140.500,00	1.039.999.150,00	115,41	1.524.390.500,00	1.584.866.425,00	103,97	1.524.390.500,00	1.330.895.000,00	87,31
	- Pajak Air Bawah Tanah	31.200.000,00	17.340.700,00	55,58	63.000.000,00	21.111.566,00	33,51	81.900.000,00	21.270.828,00	25,97
	- Pajak Sarang Burung Walet	195.000.000,00	80.222.000,00	41,14	200.000.000,00	115.044.800,00	57,52	295.000.000,00	78.461.000,00	26,60
	- Pajak BPHTB	3.500.000.000,00	3.317.048.503,00	94,77	6.500.000.000,00	2.607.409.963,00	40,11	5.416.405.993,00	4.480.491.795,00	82,72
	- PBB P2	4.450.000.000,00	4.487.054.306,00	100,83	5.500.000.000,00	4.640.360.253,00	84,37	5.500.000.000,00	4.610.394.482,00	83,83
	- Pajak Parkir	20.900.000,00	24.116.400,00	115,39	20.900.000,00	30.566.400,00	146,25	35.000.000,00	40.509.600,00	115,74
2.	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>1.438.384.780,00</b>	<b>1.896.201.671,00</b>	<b>131,83</b>	<b>3.430.808.796,00</b>	<b>2.566.363.152,00</b>	<b>74,80</b>	<b>2.581.266.250,00</b>	<b>2.422.698.393,17</b>	<b>93,86</b>
	- Retribusi Jasa Umum	402.964.780,00	595.963.000,00	147,89	1.740.708.796,00	1.228.027.533,00	70,55	1.626.266.250,00	1.502.403.818,00	92,38
	- Retribusi Jasa Usaha	501.320.000,00	511.925.800,00	102,12	788.600.000,00	781.882.200,00	99,15	755.000.000,00	828.095.200,00	109,68
	- Retribusi Perizinan Tertentu	534.100.000,00	788.312.871,00	147,60	901.500.000,00	556.453.419,00	61,73	200.000.000,00	92.199.375,17	46,10
3.	<b>HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>10.280.256.000,00</b>	<b>10.663.362.645,85</b>	<b>103,73</b>	<b>13.238.139.900,00</b>	<b>10.719.917.975,50</b>	<b>80,98</b>	<b>11.226.000.000,00</b>	<b>11.703.638.397,40</b>	<b>104,25</b>
	- Bank Jambi (Deviden)	9.120.256.000,00	9.602.267.383,48	105,29	11.732.139.900,00	9.638.772.829,50	82,16	9.796.000.000,00	10.528.936.340,30	107,48
	- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.160.000.000,00	1.061.095.262,37	91,47	1.506.000.000,00	1.081.145.146,00	71,79	1.430.000.000,00	1.174.702.057,10	82,15
4.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>62.457.980.389,93</b>	<b>72.119.310.492,35</b>	<b>115,47</b>	<b>67.659.325.510,00</b>	<b>76.867.378.049,89</b>	<b>113,61</b>	<b>79.642.348.500,00</b>	<b>83.338.855.808,81</b>	<b>104,64</b>
	- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	667.250.000,00	936.226.900,00	140,31	393.000.000,00	517.783.060,00	131,75	582.000.000,00	958.302.540,00	164,66
	- Penerimaan Jasa Giro	700.000.000,00	1.859.096.548,97	265,59	700.000.000,00	2.075.367.698,41	296,48	500.000.000,00	5.928.591.441,71	1.185,72
	- Pendapatan Bunga Deposito	11.701.448.379,93	13.224.325.686,75	113,01	12.550.000.000,00	12.601.452.027,92	100,41	8.000.000.000,00	4.877.506.870,45	60,97
	- Tuntutan Kerugian Barang Daerah	-	4.660.592.228,79	-	-	4.516.000,00	-	-	39.933.000,00	-
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	92.576.517,14	-	-	119.174.666,26	-	-	63.535.239,11	-
	- Pendapatan Denda Pajak	2.000.000,00	1.372.530,00	68,63	10.000.000,00	407.976,00	4,08	26.350.000,00	58.672.782,00	222,67
	- Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Dari Pengembalian	4.678.516.510,00	3.253.008.422,70	69,53	5.810.000.000,00	7.854.143.298,30	135,18	7.001.000.000,00	2.133.458.994,09	30,47
	- Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.708.765.500,00	12.904.046.920,00	120,50	11.451.309.000,00	10.992.857.875,00	96,00	11.451.309.000,00	10.591.484.725,00	92,49
	- Pendapatan BLUD	34.000.000.000,00	35.188.064.738,00	103,49	36.350.000.000,00	42.696.273.188,00	117,46	51.316.014.900,00	58.687.370.216,45	114,36
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	395.016.510,00	5.452.260,00	1,38	765.674.600,00	-	-
	- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-	26.862.000,00	-	-	-	-
	- Pendapatan dari Penerimaan Lainnya	-	-	-	-	17.984.800,00	-	-	-	-
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>103.453.707.669,93</b>	<b>115.509.509.302,20</b>	<b>111,65</b>	<b>120.449.593.706,00</b>	<b>121.905.955.657,39</b>	<b>101,21</b>	<b>124.644.311.243,00</b>	<b>130.480.014.294,38</b>	<b>104,68</b>
5.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.183.204.537.563,00</b>	<b>1.375.003.659.861,00</b>	<b>116,33</b>	<b>1.250.224.459.160,00</b>	<b>1.534.305.841.135,00</b>	<b>122,72</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.123.019.828.705,00</b>	<b>1.306.889.767.885,00</b>	<b>116,37</b>	<b>1.174.968.061.000,00</b>	<b>1.456.342.060.145,00</b>	<b>123,95</b>
	Dana Perimbangan	958.727.414.259,00	1.059.212.967.160,00	110,48	988.580.733.705,00	1.172.474.050.195,00	118,60	1.067.821.796.000,00	1.349.195.795.145,00	126,35
	- Bagi Hasil Pajak	145.504.165.288,00	130.522.695.657,00	89,70	187.099.242.523,00	265.377.700.335,00	141,83	112.471.791.000,00	163.397.233.015,00	145,28
	- Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	146.733.013.021,00	268.399.109.936,00	182,92	154.433.877.788,00	267.154.306.821,00	172,98	276.991.957.000,00	530.712.404.747,00	191,60
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	490.342.499.000,00	487.550.827.000,00	99,43	479.384.508.000,00	479.384.508.000,00	100,00	479.788.318.000,00	477.468.384.732,00	99,52
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	176.147.736.950,00	172.740.334.567,00	98,07	167.663.105.394,00	160.557.535.039,00	95,76	198.569.730.000,00	177.562.788.414,00	89,42
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	25.251.347.000,00	25.251.347.000,00	100,00	11.445.780.000,00	11.445.780.000,00	100,00
	Dana Desa	-	-	-	109.187.748.000,00	109.164.370.690,00	99,98	95.700.485.000,00	95.700.485.000,00	100,00
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.184.708.858,00</b>	<b>68.113.891.976,00</b>	<b>113,17</b>	<b>75.256.398.160,00</b>	<b>77.963.780.990,00</b>	<b>103,60</b>
	-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	-	-	52.144.708.858,00	60.073.891.976,00	115,21	61.856.398.160,00	64.563.780.990,00	104,38
	-Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	13.400.000.000,00	13.400.000.000,00	100,00
6.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>240.232.744.470,00</b>	<b>246.645.405.618,11</b>	<b>102,67</b>	<b>43.483.350.000,00</b>	<b>44.085.833.746,00</b>	<b>101,39</b>	<b>942.142.858,00</b>	<b>196.307.214,00</b>	<b>20,84</b>
	- Pendapatan Hibah	50.303.593.050,00	49.482.290.424,00	98,37	43.483.350.000,00	44.085.833.746,00	101,39	-	-	-
	-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	46.616.796.420,00	53.850.760.594,11	115,52	-	-	-	-	-	-
	-Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	135.272.355.000,00	135.272.354.600,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	-Bantuan Keuangan dari Provinsi	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	-	-	-	942.142.858,00	196.307.214,00	20,84
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.302.413.866.398,93</b>	<b>1.421.367.882.080,31</b>	<b>109,13</b>	<b>1.347.137.481.269,00</b>	<b>1.540.995.449.264,39</b>	<b>114,39</b>	<b>1.375.810.913.261,00</b>	<b>1.665.016.502.341,07</b>	<b>121,02</b>

Data Laporan Penerimaan Tahun 2022 Un.Audit BPK RI

• **Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah**

Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022**

NO.	JENIS PENERIMAAN	2022			ALASAN
		TARGET	REALISASI	%	
<b>A.</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>31.194.696.493,00</b>	<b>33.014.821.695,00</b>	<b>105,83</b>	
<b>1.</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>304.600.667,00</b>	<b>169,22</b>	<p>Realisasi Pajak Hotel Naik sebesar 5,25 % disebabkan</p> <p>1. Peningkatan ini disebabkan mulai berjalannya aktifitas masyarakat terutama para pelaku usaha yang bangkit akibat adanya pandemi covid 19 yang lalu, terutama pengguna jasa perhotelan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di Kec. Tungkal Ilir.</p> <p>2. Adanya pertumbuhan dan penambahan usaha Hotel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di Kec, Tungkal Ilir</p> <p>3. Mulai dibukanya tempat tempat rekreasi, penyeberangan antar daerah angkutan orang dan barang yang mendorong dunia usaha perhotelan yang ada di wilayah Kec. Tungkal ilir semakin bersaing dalam memberikan jasa pelayanan terbaik terhadap pengunjung dan pengunjung Hotel, yang akan menggunakan Jasa perhotelan.</p>
	Hotel Melati Satu	170.000.000,00	288.026.167,00	169,43	
	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Rumah Kos	10.000.000,00	16.574.500,00	165,75	
<b>2.</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>3.787.000.000,00</b>	<b>4.711.011.323,00</b>	<b>124,40</b>	<p>Terjadi peningkatan/Over target sebesar 19, 58 %</p> <p>Terjadinya peningkatan disebabkan ada beberapa perusahaan yang melakukan pembayaran Catering seperti, PT. Patra SS, PT. Indo Ceter, PT. Angsa dan pembayaran pajak Restoran lainnya serta pajak Makan minum oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )</p>
	Rumah Makan	2.970.000.000,00	3.641.372.773,00	122,61	
	Kantin / Warung kopi / Kopi	817.000.000,00	1.069.638.550,00	130,92	
<b>3.</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.844.550,00</b>	<b>76,89</b>	<p>Realisasi Pajak Hiburan berkurang 23,11 % disebabkan :</p> <p>Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkurang dan objek objek penyelenggaraan Hiburan yang dilaksanakan oleh pengusaha hiburan mengalami penurunan omzet, ini diakibatkan ketidak seimbangan biaya operasional dengan biaya yang di dapat dari penyelenggaraan hiburan dimaksud.</p>
	Permainan Bilyard	-	-	-	
	Pusat Kebugaran (Fitnes Center)	4.000.000,00	3.294.550,00	82,36	
	Penyelenggaraan Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana Karaoke	1.000.000,00	550.000,00	55,00	
<b>4.</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>422.908.324,00</b>	<b>84,58</b>	<p>Terjadi penurunan sebesar 15,42% disebabkan :</p> <p>1. Masih adanya toko yang belum melakukan aktifitas pasca pandemic Covid 19</p> <p>2. Belum Normalnya perekonomian Masyarakat terutama para pedagang manisan.</p> <p>3. Pemantauan terhadap perpanjangan izin perdangan maupun tempat usaha tidak terpantau mengingat perpanjangan izin melalui aplikasi OSS mengingat yang sebelumnya ketika suatu usaha yang akan melakukan perpanjangan izin, perpanjangan Reklame para pelaku usaha melakukan pembayaran Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda )</p>
	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	460.000.000,00	356.233.108,00	77,44	
	Reklame Kain/Spanduk	40.000.000,00	66.675.216,00	166,69	



5.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b> Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN	<b>13.870.000.000,00</b> 13.870.000.000,00 -	<b>17.010.434.126,00</b> 15.442.866.459,00 1.567.567.667,00	<b>122,64</b> 111,34 -	Realisasi Pajak PPJ mengalami peningkatan sebesar 22,64% adanya peningkatan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Oleh PLN yang mana peningkatan penjualan daya listrik, mengalami kenaikan yang disebabkan penambahan pelanggan baru pengguna Listrik.
6.	<b>Pajak Parkir</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>40.509.600,00</b>	<b>115,74</b>	Terjadi peningkatan/Over target sebesar 15,74 % disebabkan: terjadinya peningkatan penggunaan parkir di MM, Fresh, Indomart, Alfamart, S-Smart dan Bank-Bank yang ada di wilayah Kab. Tanjab Barat.
7.	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	<b>81.900.000,00</b>	<b>21.270.828,00</b>	<b>25,97</b>	Realisasi Pajak Air Bawah Tanah berkurang sebesar 74,03 % disebabkan oleh banyaknya pelanggan ABT yang beralih menggunakan PDAM ( sehingga Pelanggan Sumur Bor banyak yang beralih) Dasar penagihan untuk perusahaan Gas dan Minyak menunggu NPA ( Nilai Perolehan Air ) yang diterbitkan Oleh Gubernur dan ditindak lanjuti dengan Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat. Serta menunggu perubahan Peraturan Menteri ESDM yang sampai saat ini belum diterbitkan.
8.	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>295.000.000,00</b>	<b>78.461.000,00</b>	<b>26,60</b>	Realisasi Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet berkurang sebesar 73,40% disebabkan oleh: 1. Berkurangnya populasi burung walet khususnya di wilayah Kec. Tungkal ilir, Bram itam, dan Betara sehingga dampak hasil Sarang Burung Walet berkurang. 2. Penangkaran Sarang Burung Walet banyak berubah fungsi/tutup. 3. Banyak pemilik usaha Sarang Burung Walet berada di luar Daerah
9.	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b> Pasir Tanah Liat Kerikil Batu Split Tanah Urug Tanah Laterik	<b>1.524.390.500,00</b> 135.000.000,00 1.300.000,00 170.300.000,00 406.000.000,00 703.000.000,00 108.790.500,00	<b>1.330.895.000,00</b> - - - 1.223.235.000,00 107.660.000,00 -	<b>87,31</b> - - - 301,29 15,31 -	Terjadi Penurunan sebesar 12,69% disebabkan Pengambilan dan Penambangan Sumber Daya Alam berupa Penambangan Tanah Urug, Penambangan Batuan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat Pengenaan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Kontraktor, tidak dibenarkan lagi oleh Tim BPK RI perwakilan Provinsi Jambi yang menyatakan, yang dikenakan Pajak adalah para penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan.
10.	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</b> Perdesaan Perkotaan	<b>5.500.000.000,00</b> 2.500.000.000,00 3.000.000.000,00	<b>4.610.394.482,00</b> 3.730.739.242,00 879.655.240,00	<b>83,83</b> 149,23 29,32	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan berkurang sebesar 16,17% disebabkan 1. Adanya data tidak valid 2. Objek Pajak tidak ditemukan 3. SPPT Ganda 4. Kesadaran Masyarakat Masih Kurang dalam Pembayaran PBB-P2 5. Pelayanan Mobil keliling ke Kecamatan Belum Maksimal
11.	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>5.416.405.993,00</b>	<b>4.480.491.795,00</b>	<b>82,72</b>	Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Mengalami Penurunan sebesar 17,28% di sebabkan 1. Tidak adanya proses pembayaran Pajak BPHTB dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kab. Tanjung Jabung Barat 2. Permohonan Berkas BPHTB dari Masyarakat pada Tahun 2022 tidak Banyak Sehingga target tidak bisa terpenuhi.

<b>B.</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2.581.266.250,00</b>	<b>2.422.698.393,17</b>	<b>93,86</b>	
<b>12.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1.626.266.250,00</b>	<b>1.502.403.818,00</b>	<b>92,38</b>	
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	896.266.250,00	872.475.318,00	97,35	-
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	140.000.000,00	42.220.000,00	30,16	OPD Dinas Lingkungan Hidup
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	98.167.000,00	81,81	OPD Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pasar	70.000.000,00	88.231.500,00	126,05	OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	OPD Dinas Perhubungan
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	401.310.000,00	100,33	OPD Dinas Kominfo
<b>13.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>755.000.000,00</b>	<b>828.095.200,00</b>	<b>109,68</b>	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	465.000.000,00	318.630.000,00	68,52	-
	- Retribusi Penyewaan Tanah	205.000.000,00	154.320.000,00	75,28	-
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	85.000.000,00	51.360.000,00	60,42	-
	- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	8.800.000,00	35,20	-
	- Retribusi Pemakaian Alat	150.000.000,00	104.150.000,00	69,43	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Retribusi Terminal	90.000.000,00	94.145.000,00	104,61	OPD Dinas Perhubungan
	- Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan	180.000.000,00	404.365.200,00	224,65	OPD Dinas Perhubungan
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	20.000.000,00	10.955.000,00	54,78	OPD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
<b>14.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>92.199.375,17</b>	<b>46,10</b>	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	<b>200.000.000,00</b>	<b>92.199.375,17</b>	<b>46,10</b>	OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Retribusi Gangguan / HO	-	-	-	-
	Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-
	Retribusi Perpanjangan IMTA	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN</b>	<b>11.226.000.000,00</b>	<b>11.703.638.397,40</b>	<b>104,25</b>	
15.	Bank Jambi ( Deviden)	9.796.000.000,00	10.528.936.340,30	107,48	
16.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo	1.430.000.000,00	1.174.702.057,10	82,15	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>D.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>79.642.348.500,00</b>	<b>83.338.855.808,81</b>	<b>104,64</b>	
17.	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Di Pisahkan	582.000.000,00	958.302.540,00	164,66	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
18.	Penerimaan Jasa Giro	500.000.000,00	5.928.591.441,71	1.185,72	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
19.	Pendapatan Bunga Deposito	8.000.000.000,00	4.877.506.870,45	60,97	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah

20.	Kerugian Barang Daerah	-	39.933.000,00	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	63.535.239,11	-	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
22.	Pendapatan Denda Pajak	26.350.000,00	58.672.782,00	222,67	OPD Badan Pendapatan Daerah
23.	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	
24.	Pendapatan Dari Pengembalian	7.001.000.000,00	2.133.458.994,09	30,47	OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
25.	Pendapatan BLUD	51.316.014.900,00	58.687.370.216,45	114,36	OPD Dinas Kesehatan
26.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.451.309.000,00	10.591.484.725,00	92,49	
28.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	765.674.600,00	-	-	
29.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	58.672.782,00	-	

## Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2022

No.	Jenis Penerimaan	2022			Alasan
		Target	Realisasi	%	
I.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.250.224.459.160,00</b>	<b>1.534.250.856.898,00</b>	<b>122,72</b>	
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT</b>	<b>1.174.968.061.000,00</b>	<b>1.456.287.075.908,00</b>	<b>123,94</b>	
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.067.821.796.000,00</b>	<b>1.349.140.810.908,00</b>	<b>126,35</b>	
1.	<b>Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>389.463.748.000,00</b>	<b>694.109.637.762,00</b>	<b>178,22</b>	Terdapatnya surplus Penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dikarenakan dari penyelesaian Kurang Bayar Tahun 2021 secara keseluruhan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 218/07/ Tahun 2022 tentang perubahan Rincian Dana Bagi hasil Tahun 2022.
	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>112.471.791.000,00</b>	<b>163.397.233.015,00</b>	<b>145,28</b>	
	a. Perkebunan	7.788.357.000,00	11.232.251.518,00	144,22	
	b. Perhutanan	5.240.233.000,00	8.506.072.485,00	162,32	
	c. Migas	86.320.365.000,00	127.244.378.539,00	147,41	
	d. Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Daerah	3.820.583.000,00	4.624.250.166,00	121,04	
	e. BP PBB	3.001.940.000,00	4.442.587.199,00	147,99	
	f. Non Migas	1.403.000,00	8.185.764,00	583,45	
	g. Sektor lainnya	99.893.000,00	160.700.157,00	160,87	
	h. PPh 21	5.944.985.000,00	6.717.442.939,00	112,99	
	i. PPh 25 & 29	254.032.000,00	461.364.248,00	181,62	
	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA</b>	<b>276.991.957.000,00</b>	<b>530.712.404.747,00</b>	<b>191,60</b>	Terdapatnya surplus Penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi dikarenakan penyelesaian Kurang Bayar Tahun 2021 Sebagaimana Tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 218/07/ Tahun 2022 tentang perubahan Rincian Dana Bagi hasil Tahun 2022.
	a. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	-	-	-	
	b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.882.891.000,00	1.332.433.650,00	15,00	
	c. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	-	-	-	
	d. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (LandRent)	19.103.000,00	19.103.000,00	100,00	
	e. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (Royalty)	11.705.888.000,00	11.705.888.000,00	100,00	
	f. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	
	g. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	105.800.113.000,00	181.719.175.919,00	171,76	
	h. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	148.570.923.000,00	333.977.493.178,00	224,79	
	i. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	54.728.000,00	-	-	
	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>479.788.318.000,00</b>	<b>477.468.384.732,00</b>	<b>99,52</b>	Pelaksanaan Transfer telah sesuai dengan Perpres 98 Tahun 2022
	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>198.569.730.000,00</b>	<b>177.562.788.414,00</b>	<b>89,42</b>	
a. DAK Fisik	70.008.862.000,00	67.394.719.944,00	96,27	Evaluasi dan pelaporan DAK Fisik terdapat di BKAD Kab. Tanjung Barat.	
b. DAK Non Fisik	128.560.868.000,00	110.168.068.470,00	85,69	Evaluasi dan pelaporan DAK Non Fisik terdapat di BKAD Kab. Tanjung Barat.	

No.	Jenis Penerimaan	2022			Alasan
		Target	Realisasi	%	
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	11.445.780.000,00	11.445.780.000,00	100,00	
3.	Dana Desa	95.700.485.000,00	95.700.485.000,00	100,00	
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>75.256.398.160,00</b>	<b>77.963.780.990,00</b>	<b>103,60</b>	
1.	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>	<b>61.856.398.160,00</b>	<b>64.563.780.990,00</b>	<b>104,38</b>	Terdapat Surplus Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dikarenakan Penyelesaian Kurang Salur Dana Bagi hasil Pajak Pokok sesuai SK Gubernur No.487/KEPGUB/BPKPD/2022 dan Pembayaran kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2021 sesuai SK Gubernur No.275/KEPGUB/BPKPD/2022
a.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	13.157.440.898,00	12.416.563.573,00	94,37	
b.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.271.836.903,86	11.967.562.633,00	129,07	
c.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.391.453.983,51	22.733.758.507,00	97,19	
d.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	189.050.235,70	117.454.400,00	62,13	
e.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	15.846.616.138,93	17.328.441.877,00	109,35	
2.	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>	<b>13.400.000.000,00</b>	<b>13.400.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
a.	Bantuan Keuangan Umum dari Provinsi untuk Desa dan Kelurahan	13.400.000.000,00	13.400.000.000,00	100,00	
b.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	-	-	

### Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan/Penurunan Target Terhadap Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2022

No.	Jenis Penerimaan	2022			Alasan
		Target	Realisasi	%	
I.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>942.142.858,00</b>	<b>196.307.214,00</b>	<b>20,84</b>	
1.	<b>Pendapatan Hibah dari Dana Bos</b>	-	-	-	
a.	BOS SD	-	-	-	
b.	BOS SMP	-	-	-	
c.	BOS Afirmasi	-	-	-	
d.	BOS Kinerja	-	-	-	
2.	<b>Pendapatan atas Pengembalian Hibah</b>	-	-	-	
3.	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>	942.142.858,00	196.307.214,00	20,84	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baru Kerja Sama pada Bulan Januari 2022</li> <li>- Belum ada Gambaran Penerimaan dari BPJS</li> <li>- Ada beberapa Klaim yang tidak di terima BPJS dikarenakan Persyaratan yang tidak Lengkap</li> <li>- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) / Dokter Spesialis</li> </ul>

## ❖ **Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2022 terus mengalami peningkatan, dari tabel Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2022 diatas dapat kita lihat bahwa Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Rp.1.540.995.449.264,39,Tahun 2022 Rp. 1.665.016.502.341,07. Jumlah tersebut merupakan Akumulasi dari jumlah penerimaan pendapatan asli daerah ditambah Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Perkembangan Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2021-2022 cukup Signifikan, Realisasi PAD Tahun 2021 Sebesar Rp. 121.905.955.657,39, Target Penerimaan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2021 Sebesar Rp. 1.247.761.849.420,00 dan Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Sebesar 9,77% Sedangkan Untuk Tahun 2022 Realisasi Penerimaan Asli Daerah Sebesar Rp. 130.480.014.294,38 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Rp. 1,150,000,000,000,00 dari Target 8,06% terealisasi sebesar 11,35% terjadi Peningkatan sebesar 1,58% dari Tahun Sebelumnya.

### **2. Pendapatan Transfer**

Penerimaan Pendapatan Transfer Juga Mengalami Peningkatan dari Tahun 2021, Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2021 Sebesar Rp. 1.375.003.659.861,00 dari Target Rp. 1.183.204.537.563,00 atau 116,33% sedangkan Realisasi Tahun 2022 sebesar 1.534.305.841.135,00 dari Target Rp. 1.250.224.459.160,00 atau 122,72%.

Pendapatan Transfer Terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 yang Bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp. 196.307.214,00 dari target Rp. 942.142.858,00 atau 20,84%.

### 4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Realisasi		Jumlah	Kinerja (%)
	Pajak Daerah	Lain-lain PAD yang sah		
2021	31.752.296.480,00	407.976,00	31.752.704.456,00	2,99
2022	33.014.821.695,00	58.672.782,00	33.073.494.477,00	4,16

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2021 - 2022 juga mengalami Peningkatan. Tahun 2021 tercapai sebesar 2,99%, sedangkan untuk Tahun 2022 Sebesar 4,16%

### 5. Perkembangan Kontribusi PAD dan PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kontribusi Penerimaan PAD yang dikelola Bapenda terhadap PAD Tahun 2021-2022.

Tahun	Realisasi Penerimaan Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah	Realisasi PAD yang dikelola Dipenda	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan Daerah	Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)
2021	1.540.995.449.264,39	121.905.955.657,39	7,91	31.752.704.456,00	2,06	26,79
2022	1.665.016.502.341,07	130.480.014.294,38	7,84	33.073.494.477,00	1,99	25,35

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021-2022 berkisar di atas 7%, sedangkan Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021-2022 hanya berkisar antara 1% - 2%, untuk tahun 2022 berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah untuk kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 7,84%, sedangkan untuk kontribusi PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 1,99% dan Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 25,35%.



### 3. Capaian Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Rpjmd Menurut Urusan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021 sampai dengan 2026, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran PAD						Realisasi Kinerja Sasaran PAD						Capaian Kinerja Sasaran PAD					
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	<b>Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah</b>	7,98%	8,06%	8,12%	8,16%	8,18%	8,18%	9,77	11,35	-	-	-	-	122,43	140,82	-	-	-	-
		- Persentase capaian penerimaan PBB dan BPHTB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,40	83,28	-	-	-	-	60,40	83,28	-	-	-	-
		- Persentase capaian penerimaan pajak lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101,59	117,98	-	-	-	-	101,59	117,98	-	-	-	-
		- Jumlah pelaporan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
		- Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan	3 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	6 Kali	10 Kali	3 Kali	8 Kali	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
		- Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran PAD						Realisasi Kinerja Sasaran PAD						Capaian Kinerja Sasaran PAD						
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun V 2025	Tahun VI 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		- Jumlah aplikasi yang dikelola	5 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	5 Aplikasi	4 Aplikasi	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	
2		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>78,24%</b>	<b>79,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>81,00%</b>	<b>82,00%</b>	<b>83,00%</b>	<b>78,88%</b>	<b>83,73%</b>	-	-	-	-	<b>100,82</b>	<b>105,99</b>	-	-	-	-	
		<b>Nilai AKIP</b>	<b>68,99%</b>	<b>69,00%</b>	<b>69,25%</b>	<b>68,50%</b>	<b>68,75%</b>	<b>70,00%</b>	<b>60,85%</b>	<b>76,13%</b>	-	-	-	-	<b>88,20</b>	<b>110,33</b>	-	-	-	-	
		- Persentase pemenuhan komponen IKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
		- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-
		- Persentase pemenuhan komponen SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	

Evaluasi terhadap Capaian RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Insikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	7,98%	9,77%	8,06%	11,35%	8,12%		8,16%		8,18%		8,18%		8,18%		BAPENDA
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,95%	7,91%	7,00%	7,84%	7,07%		7,27%		7,68%		8,42%		8,42%		BAPENDA
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah															BAPENDA
a. Pajak Daerah	11	11	11	11	11		11		11		11		11		BAPENDA
b. Retribusi Daerah	3	3	3	3	3		3		3		3		3		BAPENDA

Sebagaimana tabel diatas dapat kami jabarkan bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja pada Tahun 2022 dari target 8,06% terealisasi sebesar 11,35% , Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dari Target 7,00% terealisasi 7,84%, dengan 11 Jenis Pajak Daerah dan 3 Jenis Retribusi Daerah.

#### 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

##### ➤ Sumber Daya Aparatur

##### 1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 126 Orang, terdiri dari PNS/CPNS sebanyak 47 Orang dan Tenaga Kontrak/Honorar sebanyak 79 Orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada sebagai berikut :

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1.	Pegawai Negeri Sipil/CPNS	47	37,00
2.	TKS/TKK	79	63,00
	<b>Jumlah</b>	<b>126</b>	<b>100,00</b>

Dari jumlah pegawai tersebut diatas, dapat di klarifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:

**Tabel a – Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

Gol	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
II	6	-	-	-	6	5,00
III	37	-	-	-	37	29,00
IV	4	-	-	-	4	3,00
Tenaga Kontrak	-	-	-	79	79	63,00

<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>126</b>	<b>100,00</b>
--------------	-----------	----------	----------	-----------	------------	---------------

**Tabel b – Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>PNS</b>	<b>CPNS</b>	<b>Kontrak Pemda</b>	<b>Kontrak Dinas</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Laki-laki	24	-	-	38	62	49,00
Perempuan	23	-	-	41	64	51,00
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>126</b>	<b>100,00</b>

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut:

- 1) Sekretariat : 42 Orang
- 2) Bidang PBB-P2 dan BPHTB : 29 Orang
- 3) Bidang Pajak Daerah : 23 Orang
- 4) Bidang Pengendalian dan Pelaporan : 16 Orang
- 5) Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah : 16 Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatannya:

- 1) Eselon II B (Kepala Badan) : 1 Orang
- 2) Eselon III A (Sekretaris) : 1 Orang
- 3) Eselon III B (Kepala Bidang) : 3 Orang
- 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/JFT) : 15 Orang
- 5) Pelaksana : 106 Orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d)

**Tabel c – Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>PNS</b>	<b>CPNS</b>	<b>Kontrak Pemda</b>	<b>Kontrak Dinas</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Strata-2 (S2)	2	-	-	-	2	1,60
Strata-1 (S1)	29	-	-	38	67	53,20
Sarjana Muda/D3	4	-	-	1	5	4,00
SLTA/SMK	12	-	-	39	51	40,50
SD	-	-	-	1	1	0,80
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>126</b>	<b>100,00</b>

**Tabel d – Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan**

<b>Strata Pendidikan</b>	<b>PNS</b>	<b>CPNS</b>	<b>Kontrak Pemda</b>	<b>Kontrak Dinas</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>Magister</b>						
1. Magister Ekonomi	1	-	-	-	1	0,77
2. Magister Sosial Politik	1	-	-	-	1	0,77
<b>Sarjana</b>						
1. Ilmu Sains/Biologi	-	-	-	1	1	0,77
2. Ilmu Sosial	1	-	-	4	5	3,85
3. Ilmu Hukum	3	-	-	6	9	6,92
4. Ilmu Ekonomi	16	-	-	17	33	25,38
5. Ilmu Pendidikan	-	-	-	4	4	3,08
6. Ilmu Administrasi Manajemen Publik	3	-	-	-	3	2,38
7. Ilmu Administrasi Negara	1	-	-	-	1	0,77
8. Ilmu Administrasi Perpajakan	2	-	-	-	2	1,54
9. Pertanian	1	-	-	-	1	0,77
10. Peternakan	-	-	-	-	-	-
11. Komputer/Informatika	1	-	-	2	3	2,31
12. Ilmu Komunikasi	1	-	-	2	3	2,31
13. Kesehatan	-	-	-	2	2	1,54
<b>Sarjana Muda</b>						
1. Manajemen Informatika	1	-	-	1	2	1,54
2. Ekonomi	3	-	-	-	3	2,31
<b>Menengah Kejuruan</b>	7	-	-	7	14	10,77
<b>Menengah Atas</b>	5	-	-	32	37	29,37
<b>Sekolah Dasar</b>	-	-	-	1	1	0,77
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>-</b>		<b>79</b>	<b>126</b>	<b>100</b>

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Membuat daftar nominatif, bazzeting dan daftar urutan kepangkatan pegawai (DUK), LP2P, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun, buku induk pegawai.
- 2) Pengembangan pegawai.
- 3) Mengelola daftar hadir.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Koordinasi pembuatan DP3.
- 6) Kesejahteraan pegawai.
- 7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana tabel e berikut ini:

**Tabel e – Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan**

Jabatan/Staf	Jumlah	%
Spama/Diklat PIM III	2	20
Adun/Adumla/Diklat	8	80
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

➤ **Sarana Prasarana**

Pada saat ini Kantor Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Jl. Beringin Kuala Tungkal. Berdasarkan Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2022 Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

**Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Per 31 Desember 2022**

Uraian	2022
<b>ASET</b>	<b>18.503.770.916,50</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>2.160.851.109,50</b>
<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>8.377.272.958,50</b>
Piutang Pajak Daerah	8.377.272.958,50
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(6.575.319.919,00)</b>
Penyisihan Piutang Pendapatan	(6.575.319.919,00)
<b>Beban dibayar di muka</b>	<b>11.750.000,00</b>
Beban Jasa dibayar di muka	11.750.000,00
<b>Persediaan</b>	<b>347.148.070,00</b>
Persediaan Bahan Pakai Habis	117.985.250,00
Persediaan Barang Lainnya	229.162.820,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>16.316.464.807,00</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>11.607.489.651,47</b>
Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	2.549.796.500,00
Alat Ukur	89.100.000,00
Alat Kantor	2.475.056.472,47
Alat Rumah Tangga	1.863.273.873,00
Komputer	3.626.144.306,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	163.874.500,00
Alat Studio	541.239.000,00
Alat Komunikasi	3.490.000,00
Peralatan Pemancar	295.515.000,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>17.479.629.402,53</b>
Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.762.954.902,53
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	716.674.500,00



<b>Uraian</b>	<b>2022</b>
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>64.760.000,00</b>
Bangunan Air (Irigasi)	64.760.000,00
<b>Konstruksi dalam pengerjaan</b>	<b>8.943.000,00</b>
Konstruksi dalam pengerjaan	8.943.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(12.844.357.247,00)</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.105.100.320,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.717.670.265,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	(21.586.662,00)
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>26.455.000,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>26.455.000,00</b>
Aset Tak Berwujud lainnya	837.300.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(810.845.000,00)
Aset lain-lain	56.525.000,00
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	(56.525.000,00)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>18.503.770.916,50</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>72.562.818,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>72.562.818,00</b>
<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>72.562.818,00</b>
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	72.562.818,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>72.562.818,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>18.431.208.098,50</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>18.431.208.098,50</b>
Ekuitas	18.431.208.098,50
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>18.431.208.098,50</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>18.503.770.916,50</b>

➤ **Pendanaan**

Jumlah belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 12.377.200.665 terealisasi Rp. 11.476.404.725 atau 92.72% yang terdiri dari :

1. Belanja Operasional dari anggaran Rp. 11.526.919.193 terealisasi Rp. 10.633.404.725 atau 92.25% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 893.514.468 atau 7,75%.
2. Belanja Modal dari anggaran Rp. 850.281.472 terealisasi Rp. 843.000.000 atau 99.14% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.281.472 atau 0,86%

**5. Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pencapaian target pada pernyataan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dengan jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun Anggaran 2022**

No	Program	Anggaran		Realisasi	
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan	
				Jumlah	%
PROGRAM PENDUKUNG					
1.	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.183.417.055	82,28	9.416.748.434	92,47
PROGRAM UTAMA					
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.193.783.610	17,72	2.059.656.291	93,89
<b>JUMLAH 2022</b>		12.377.200.665	<b>100</b>	<b>11.476.404.725</b>	<b>92,72</b>

Dari tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 1 Program Pendukung dan 1 Program Utama. Program Pendukung dengan penyerapan anggaran 92,47% sebagai efisiensi anggaran Program Utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah setelah APBDP Tahun 2022 Penyerapan Anggaran sebesar 92,72% .

Dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan Indikator dan Target Kinerja Kepala Bidang yang dijadikan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PK) Eselon III antara lain:

### **1. Bidang Pajak Daerah**

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- Persentase Capaian Penerimaan Pajak Lainnya dengan Target 100% Bidang Pajak Daerah mengelola 9 Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir. Realisasi jumlah penerimaan 9 Pajak Daerah yang dikelola oleh Bidang Pajak Daerah Tahun 2022

sebesar Rp. 23.923.935.418 Dari Target sebesar Rp. 20.278.290.500 (117,98%) .Pajak Daerah yang Realisasinya tidak mencapai 100% antara lain :

- Pajak Hiburan, ini disebabkan Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkurang dan objek-objek penyelenggaraan Hiburan yang dilaksanakan oleh pengusaha hiburan mengalami penurunan omzet, ini diakibatkan ketidakseimbangan biaya operasional dengan biaya yang di dapat dari penyelenggaraan hiburan dimaksud.
- Pajak Reklame disebabkan Masih adanya toko yang belum melakukan aktifitas pasca pandemic Covid 19, Belum Normalnya Perekonomian Masyarakat Terutama para Pedagang Manisan dan Pemantauan terhadap perpanjangan izin perdagangan tempat usaha tidak terpantau mengingat perpanjangan Izin melalui aplikasi OSS ,mengingat yang sebelumnya ketika suatu usaha yang akan melakukan perpanjangan izin, perpanjangan Reklame para pelaku usaha melakukan pembayaran Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ).
- Pajak Air Bawah Tanah, ini disebabkan oleh banyaknya pelanggan ABT yang beralih menggunakan PDAM ( sehingga Pelanggan Sumur Bor banyak yang beralih) Dasar penagihan untuk perusahaan Gas dan Minyak menunggu NPA ( Nilai Perolehan Air ) yang diterbitkan Oleh Gubernur dan ditindak lanjuti dengan Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat. Serta menunggu perubahan Peraturan Menteri ESDM yang sampai saat ini belum diterbitkan.
- Pajak Sarang Burung Walet, ini disebabkan berkurangnya populasi burung walet khususnya di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, Bram Itam dan Betara sehingga dampak hasil Sarang Burung Walet Berkurang, Penangkaran Sarang Burung Walet banyak berubah fungsi/tutup dan Banyak Pemilik Usaha Sarang Burung Walet berada di luar Daerah.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ini disebabkan Pengambilan dan Penambangan Sumber Daya Alam berupa Penambangan Tanah

Urug, Penambangan Batuan diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat Pengenaan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Kontraktor, tidak dibenarkan lagi oleh Tim BPK RI perwakilan Provinsi Jambi yang menyatakan, yang dikenakan Pajak adalah para penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>▪Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan</b>	<b>8.06%</b>	<b>11,35%</b>	<b>140,82%</b>	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		96.135.351.000	130.480.014.294,38	135,73%	
			Persentase realisasi penerimaan 9 pajak daerah	Rp. 20.278.290.500	23.923.935.418	117,98%	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	100,00%	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	
	Penagihan Pajak daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	

Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%	
--	--	---	------------	------------	---------	--

## 2. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Persentase Capaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 100%. Jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Tahun 2022 sebesar Rp. 9.090.886.277,00 dari Target sebesar Rp. 10.916.405.993,00.

Penyebab Tidak tercapainya Target Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB antara lain Karena PBB-P2 ada Data yang Tidak Valid, Objek Tidak ditemukan, SPPT Ganda, Kesadaran Masyarakat Masih Kurang dalam Pembayaran PBB-P2 dan Pelayanan Mobil keliing ke Kecamatan Belum Maksimal. Sedangkan untuk Pajak BPHTB Karena Tidak adanya proses pembayaran Pajak BPHTB dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kab. Tanjung Jabung Barat dan Permohonan Berkas BPHTB dari Masyarakat pada Tahun 2022 tidak Banyak Sehingga target tidak bisa terpenuhi.

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang PBB –P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	•Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	8.06%	11,35%	140,82 %	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		96.135.351.000	130.480.014.294,38	135,73%	
			Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	10.916.405.993	9.090.886.277	83,28%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	100,00%	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	
	Penagihan Pajak daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	2500 OP	3991 OP	159,64%	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40 Layanan	100 Layanan	250,00%	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	25 Dokumen	49 Dokumen	196,00%	

### 3. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mendapatkan laporan penerimaan daerah yang valid Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai koordinator di Bidang Pendapatan Daerah setiap awal bulan melakukan rekonsiliasi dengan 16 SKPD, Lembaga/Instansi terkait baik dari pusat dan daerah serta stakeholder lainnya untuk mensinkronkan data penerimaan pada masing-masing pengelola pendapatan, sedangkan untuk pengendalian penerimaan pendapatan daerah, penerimaan dana transfer dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) namun sebagaimana salah satu tugas dan fungsi pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada Subbidang Dana Transfer antara lain melakukan penyusunan rencana petunjuk dan pelaksana teknis, monitoring dan evaluasi penerimaan dana transfer, pengumpulan data penyaluran dana transfer yang merupakan penerimaan daerah dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan yaitu Jumlah Laporan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Target 16 Laporan dilaksanakan melalui Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	•Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	8.06%	11,35%	140,82%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		96.135.351.000	130.480.014.294,38	135,73%	



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	16 Laporan	100%	

#### 4. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah. Dalam melakukan tugas bidang pengembangan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak daerah dan perkembangan penerimaan daerah, perhitungan potensi pajak daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah serta penyusunan draft regulasi PAD. Pada Tahun 2022 untuk layanan informasi pajak daerah yang muktahir dan akurat terealisasi 100% dengan tersedianya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah dengan memakai 6 Aplikasi antara lain : SISMIOP, BPHTB, SIMPEDA, SIMPAREDA, E-PAYMENT dan Web Bapenda.

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>•Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan</b>	<b>8.06%</b>	<b>11,35%</b>	<b>140,82%</b>	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		96.135.351.000	130.480.014.294,38	135,73%	
	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit	100,00%	
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	

## 5. Sekretariat

Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung sasaran 2 pada Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akip.

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- Persentase temuan audit pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan target 90%
- Persentase Pemenuhan Komponen IKM dengan target 100%
- Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP dengan target 100%

Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
I.	Perogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM		79,00%	83,73%	105,99%	
		Nilai SAKIP		69,00%	76,13%	110,33%	
			Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	98,76%	98,76%	
1.	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Dokumen Perencanaa n</li> </ul>	4 Dok	4 Dok	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja</li> </ul>	12 Lap	12 Lap	100%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1 Dok</b>	<b>92,73</b>	<b>92,73%</b>	Jumlah ASN Bapenda Tahun 2022 sebanyak <u>47</u> Orang
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	47 Orang	85,45%	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	100,00%	
3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>	<b>100,00%</b>	
	▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100,00%	
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>100,00%</b>	
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> </ul>		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyedia Bahan Logistik Kantor</li> </ul>		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> </ul>		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan</li> </ul>		Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	12 Dok	12 Dok	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	
5.	<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>100,00%</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> </ul>		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ul>		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	34 Unit	34 Unit	100,00%	
6.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>100,00%</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> </ul>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ul>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	
7.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86%</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> </ul>		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> </ul>		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	41 Unit	41 Unit	100%	1 Unit Mesin Cetak NPWPD dalam keadaan Rusak Berat, Anggaran tersedia tidak mencukupi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</li> </ul>		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara	174 Unit	173 Unit	99,43%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</li> </ul>		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%	

## B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan target Rp. 31.221.046.493 terealisasi sebesar Rp. 33.073.494.477 atau 105,93%, sedangkan jumlah Belanja yang di anggarkan pada APBDP Bapenda Tahun 2022 sebesar Rp. 12.377.200.665 terealisasi Rp. 11.476.404.725 atau 92,72% dengan perincian sebagai berikut :

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>4.</b>	<b><u>PENDAPATAN - LRA</u></b>	<b>31.221.046.493,00</b>	<b>33.073.494.477,00</b>	<b>105,93</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>31.221.046.493,00</b>	<b>33.073.494.477,00</b>	<b>105,93</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</b>	<b>31.194.696.493,00</b>	<b>33.014.821.695,00</b>	<b>105,83</b>
4.1.1.06.	Pajak Hotel – LRA	180.000.000,00	304.600.667,00	169,22
4.1.1.07.	Pajak Restoran – LRA	3.787.000.000,00	4.711.011.323,00	124,40
4.1.1.08.	Pajak Hiburan – LRA	5.000.000,00	3.844.550,00	76,89
4.1.1.09.	Pajak Reklame – LRA	500.000.000,00	422.908.324,00	84,58
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	13.870.000.000,00	17.010.434.126,00	122,64
4.1.1.11.	Pajak Parkir – LRA	35.000.000,00	40.509.600,00	115,74
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LRA	81.900.000,00	21.270.828,00	25,97
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	295.000.000,00	78.461.000,00	26,60



<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	1.524.390.500,00	1.330.895.000,00	87,31
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	5.500.000.000,00	4.610.394.482,00	83,83
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	5.416.405.993,00	4.480.491.795,00	82,72
<b>4.1.4</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah – LRA</b>	<b>26.350.000,00</b>	<b>58.672.782,00</b>	<b>222,67</b>
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak – LRA	26.350.000,00	58.672.782,00	222,67
<b>5.</b>	<b><u>BELANJA</u></b>	<b>12.377.200.665,00</b>	<b>11.476.404.724,93</b>	<b>92,72</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.526.919.193,00</b>	<b>10.633.404.724,93</b>	<b>92,25</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.222.964.935,00</b>	<b>6.531.951.768,93</b>	<b>90,43</b>
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.477.689.811,00	3.104.378.965,00	89,27
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.990.000.000,00	1.886.335.000,00	94,78
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	975.407.412,00	850.334.494,55	87,18
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	779.867.412,00	690.903.309,38	88,59

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.303.954.558,00</b>	<b>4.101.452.956,00</b>	<b>95,29</b>
5.1.2.01	Belanja Barang	1.343.851.708,00	1.193.158.891,00	88,79
5.1.2.02	Belanja Jasa	1.930.520.000,00	1.900.971.893,00	98,47
5.1.2.03.	Belanja Pemeliharaan	393.588.000,00	382.803.300,00	97,20
5.1.2.04.	Belanja Perjalanan Dinas	558.944.850,00	547.768.872,00	98,00
5.1.2.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.050.000,00	76.750.000,00	99,61
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>850.281.472,00</b>	<b>843.000.000,00</b>	<b>99.14</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>850.281.472,00</b>	<b>843.000.000,00</b>	<b>99.14</b>
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	450.000.000,00	449.900.000,00	99,98
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	212.381.472,00	206.210.000,00	97,09
5.2.2.10.	Belanja Modal Komputer	187.900.000,00	186.890.000,00	99,46
<b>5.Z</b>	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>18.843.845.828,00</b>	<b>21.597.089.752,07</b>	<b>114,6</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Untuk Penerimaan Daerah Tahun 2022 dari target Rp. 1.375.810.913.261,00 terealisasi sebesar Rp. 1.665.016.502.341,07 atau 121,02%, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target Rp. 124.644.311.243,00 terealisasi sebesar Rp. 130.480.014.294,38 atau 104,68%, sedangkan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 121.905.955.657,39 atau 101,21%,

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bapenda pada sasaran pertama yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 Dengan Target 8,06% terealisasi sebesar 11,35% dengan capaian 140,82%

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar 105,93%, ini disebabkan :

Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang Realisasinya Melampaui Target antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir, sedangkan Pajak Daerah yang belum tercapai Targetnya yang dikelola oleh Bapenda akan terus diupayakan dan akan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :

- a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
- b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
- d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
- e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Akhirnya melalui laporan kinerja instansi pemerintah di samping berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Government. Selain itu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga bertugas sebagai media pertanggung jawaban penyelenggaraan Negara kepada masyarakat.

Kuala Tungkal, *6-Maret* 2023

KEPALA BAPENDA



*Sugianto*  
SUGIANTO, SE

Pembina

NIP. 19670317 199002 1 001